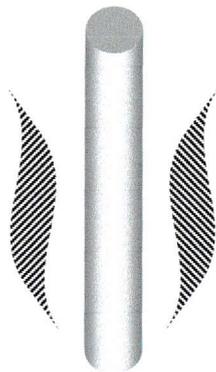




# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH  
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. JEND.A.YANI NO.76, TELP. (0519) 21120-21446-24565 FAX.22432 Website : www.baritoutarakab.go.id  
Email : setda@baritoutarakab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jufriansyah**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**

Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

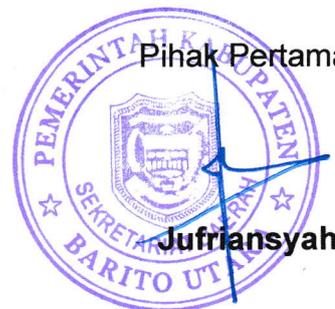
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, 17 Januari 2024



Pihak Kedua,

**Muhlis**



Pihak Pertama,

**Jufriansyah**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (65)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9000)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Penataan Organisasi		
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 510.000.000,-	APBD
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 407.000.000,-	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 580.000.000,-	APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 680.027.000,-	APBD
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 361.305.625,-	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 466.581.875,-	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 595.399.000,-	APBD
3. Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 449.001.625,-	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 482.164.750,-	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 274.234.250,-	APBD

